

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
di Kota Jambi**

oleh :

*) M. Sabyan, S.E., M.E.

*) Andri Devita, S.E.

**)Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi

Abstract

This research measures financial performance of local government (PAD) at Jambi city using ratio analysis. Local government fund must be spent based on 3 E principles that is economic, efficient, and effective. Moreover, accountability is not simply showing the ability to expend public funds, but including on how to spend economically, efficient, and effective. The result indicates the average of PAD in Jambi city is above 100%, although the regular expenses are still above PAD. Therefore, the dependence level to the central government is very high.

Keywords : Financial Performance, APBD, Local Financial, Ratio Analysis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan

bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana perimbangan tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lain-lain daerah yang sah.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kota Jambi

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan di Kota Jambi dalam mengukur keberhasilan kinerja keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah, (Prasetya, 2005).

Keuangan daerah adalah masalah yang kompleks, berkisar pada penerimaan dan pengeluaran daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah dengan sebaik-baiknya dan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai mana diatur Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, (Anonim, 2005). Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil sumberdaya-sumberdaya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaatnya untuk masyarakat. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang baru. Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh daerah baik dalam bentuk uang atau material jasa lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau potensi-potensi yang ada yang berasal dari daerah sendiri. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) hasil guna dan (5) pengendalian (Binder, 1984).

Mardiasmo (2006), perubahan yang fundamental dalam sistem tata pemerintahan dan sistem keuangan pemerintahan pusat dan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 adalah pada sistem pemerintahan, perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas dan nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu memiliki kesiapannya untuk menyiapkan diri secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi dalam mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggungjawab dan dinamis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46) menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi, dan informatif. Selanjutnya Mardiasmo (2000) mengemukakan elemen penting manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi : akuntabilitas, nilai uang (*value for money*), kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

Struktur APBD

Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.
Kelompok pendapatan terdiri atas: Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan
2. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
- b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

- c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

METODE PENELITIAN

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data yang dihimpun terdiri dari data sekunder yang bersumber dari beberapa instansi, disamping itu juga bersumber dari buku-buku, literatur, internet.

Analisis Deskriptif Belanja Pemerintah Daerah

Metode analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode analisis deskriptif untuk menjawab tujuan dengan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$R = \frac{P}{T}$$

Dimana :

RK = Rasio Kemandirian Keuangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TP = Total Penerimaan

- b. Menghitung rasio Efektifitas keuangan daerah berdasarkan APBD

$$R = \frac{R}{T}$$

Dimana :

RE = Rasio Efektifitas Keuangan
 RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 TPAD = Target Pendapatan Asli Daerah

- c. Menghitung rasio Aktifitas yang terdiri dari :

Rasio Belanja Langsung terhadap APBD

$$R = \frac{B}{T}$$

Dimana :

RBL = Rasio Belanja Langsung
 BL = Belanja Langsung
 TP = Total Pendapatan

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap APBD

$$R = \frac{B}{T}$$

Dimana :

RBTL = Rasio Belanja Tidak Langsung
 BTL = Belanja Tidak Langsung
 TP = Total Pendapatan

- d. Menghitung rasio pengelolaan Belanja

$$R = \frac{T}{T} \times 100\%$$

Dimana :

RPB = Rasio Pengelolaan Belanja
 TP = Total Penerimaan
 TB = Total Belanja

- e. Menghitung rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung :

Persentase Pertumbuhan PAD

$$G = \frac{P - P_{-1}}{P_{-1}} \times 100\%$$

Dimana :

GPAD = Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 t = Tahun tertentu
 t-1 = Tahun Sebelumnya
 PAD = Pendapatan Asli Daerah

Persentase Pertumbuhan total Pendapatan

$$G = \frac{T - T_{-1}}{T_{-1}} \times 100\%$$

Dimana :
 GTP = Laju pertumbuhan Total Pendapatan
 t = Tahun tertentu
 t-1 = Tahun Sebelumnya
 TP = Total Pendapatan

Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung

$$G = \frac{B - B_{-1}}{B_{-1}} \times 100\%$$

Dimana :
 GBL = Laju pertumbuhan Belanja Langsung
 t = Tahun tertentu
 t-1 = Tahun Sebelumnya
 BL = Belanja Langsung

Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

$$G = \frac{B - B_{-1}}{B_{-1}} \times 100\%$$

Dimana :
 GBTL = Laju pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
 t = Tahun tertentu
 t-1 = Tahun Sebelumnya
 BTL = Belanja Tidak Langsung

Sedangkan untuk melihat berapa besar kontribusi Belanja Langsung (BL) terhadap Belanja Daerah (BD) dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$K = \frac{B}{B} \times 100\%$$

Dimana :
 KBL = Kontribusi Belanja Langsung
 BL = Belanja Langsung
 BD = Belanja Daerah

Dan untuk melihat berapa besar kontribusi Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Belanja Daerah (BD) dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$K = \frac{B}{B} \times 100\%$$

Dimana :
 KBTL = Kontribusi Belanja Tidak Langsung
 BTL = Belanja Tidak Langsung
 BD = Belanja Daerah

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2012. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

1. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah

Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012

No	Tahun	Total Pendapatan	Realisasi PAD	Kontribusi PAD (%)
1.	2009	608.555.058.534	55.671.281.870	9,15
2.	2010	692.168.599.886	70.842.049.481	10,23
3.	2011	869.966.667.732	98.999.978.722	11,38
4	2012	1.018.846.008.975	113.091.896.472	11,10
Rata-rata kemandirian Keuangan Daerah				10,47

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah Kota Jambi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 masih kategori ***kurang*** yaitu rata-rata 10,47% kurang dari 50% kemampuan Kota Jambi dalam membiayai pembangunan. Namun demikian memperlihatkan selama periode tersebut terjadi peningkatan dalam kinerja pengelolaan keuangan, ini terlihat pada tahun 2009 sebesar 9,15%, pada tahun 2010 sebesar 10,23%, pada tahun 2011 sebesar 11,38% dan pada tahun 2012 sebesar 11,10 %. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi kurang baik meskipun pada tahun 2010 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 9,15 % menjadi 10,23 % atau 1,08 % dari tahun 2009, dan di tahun 2011 juga mengalami kenaikan dari 10,23 % menjadi 11,38% atau 1,15% dari tahun 2010. Namun pada tahun 2012 rasio

kemandirian keuangan mengalami penurunan dari 11,38% pada tahun 2011 menjadi 11,10% pada tahun 2012 (0,28% dari tahun 2012).

2. Ratio Efektifitas

Ratio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 2
Efektifitas Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektifitas (%)
1.	2009	51.847.106.988	55.671.281.870	107,38
2.	2010	70.151.342.519	70.842.049.481	100,98
3.	2011	85.821.530.834	98.999.978.722	115,36
4.	2012	100.633.402.320	113.091.896.472	112,38
Rata-rata rasio efektifitas				109,02

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)

Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi **Sangat Efektif** karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2009 s/d 2012 sebesar 109,02 % seperti pada tahun 2009 yaitu sebesar 107,38 %. Sedangkan pada tahun 2010 membaik meski peningkatannya secara proporsi lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 100,98 %. Pada tahun 2011 efektifitas pengelolaan keuangan lebih membaik yaitu sebesar 115,36% lebih tinggi bila dibanding realisasi tahun 2009 dan 2010 karena pada tahun 2011 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100% kecuali pos retribusi daerah yaitu sebesar 92,70% tetapi tetap lebih baik bila dibanding tahun 2010 yang hanya 70,35%. Namun pada tahun 2012 kembali turun dari 115,36% menjadi 112,38% atau turun sebesar 2,98% dari tahun 2011.

3. Ratio Aktifitas

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau pada belanja tidak langsung secara optimal.

Tabel 3
Realisasi APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012
(Dalam Rupiah)

Tahun	Total Belanja	Belanja		Rasio	Rasio
		BL	BTL	BL (%)	BTL (%)
2009	608.100.845.544	216.442.249.426	391.658.596.118	35,59	64,41
2010	669.435.527.164	199.003.408.817	470.432.118.347	29,73	70,27
2011	852.846.534.125	303.869.426.191	548.977.107.934	35,63	64,37
2012	964.758.880.565	369.180.455.795	595.578.424.770	38,27	61,73

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)

Dari perhitungan rasio aktifitas diatas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung terhadap APBD masih sangat rendah. Ratio belanja tidak langsung pada tahun 2009 adalah 64,41% dan rasio belanja langsung sebesar 35,59%, pada tahun 2010 ratio belanja tidak langsung meningkat menjadi 70,27% dan rasio belanja langsung turun menjadi 29,73%, ratio belanja tidak langsung pada tahun 2011 turun menjadi 64,34% dan rasio belanja langsung naik menjadi 35,63%. Di tahun 2012 ratio belanja tidak langsung kembali turun menjadi 61,73% dan ratio belanja langsung naik menjadi 38,27%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ratio aktifitas pemerintah Kota Jambi lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja tidak langsung dari pada belanja langsung. Meski terjadi pengurangan proporsi belanja tidak langsung namun rielnya masih tinggi proporsi belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Untuk itu belanja pegawai/ personalia perlu ditekan oleh pemerintah Kota Jambi guna dialokasikan untuk belanja modal yang berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat Kota Jambi.

4. Ratio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus/ defisit anggaran.

Tabel 4
Laporan Surplus/Defisit APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012
(Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/ Defisit	Rasio Pengelolaan Belanja
1.	2009	608.555.058.534	608.100.845.544	454.212.990	100,07
2.	2010	692.168.599.886	669.435.527.164	22.733.072.722	103,40
3.	2011	869.966.667.732	852.846.534.125	17.120.133.607	102,01
4.	2012	1.018.846.008.975	964.758.880.565	54.087.128.410	105,61

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)

Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja diatas dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2012 yaitu diatas 100% sebesar 105,61% yang menunjukkan adanya surplus pada tahun 2012 yang sebesar Rp. 54.087.128.410 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami surplus anggaran yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 454.212.990, tahun 2010 sebesar Rp. 22.733.072.722 dan tahun 2011 sebesar Rp.17.120.133.607. Ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari pemerintah Kota Jambi pada tahun 2012 seperti PAD dan DAU.

Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan pemerintah Kota Jambi dalam menekan realisasi atas belanja yang keseluruhan realisasi belanja pada tahun 2012 di bawah 100% dari target yang telah direncanakan. Sehingga total belanja pemerintah Kota Jambi lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Kota Jambi.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode.

Tabel 5
Rasio Pertumbuhan APBD Kota Jambi
Tahun Anggaran 2009 S/D 2012

Keterangan	2009	2010	2011	2012
Realisasi PAD	55.671.281.870	70.842.049.481	98.999.978.722	113.091.896.472
Growth PAD		27,25	39,75	14,23
Realisasi Pendapatan	608.555.058.534	692.168.599.886	869.966.667.732	1.018.846.008.975
Growth Pendapatan		13,74	25,69	17,11
Realisasi BL	216.442.249.426	199.003.408.817	303.869.426.191	369.180.455.795
Growth BL		-8,06	52,70	21,49
Realisasi BTL	391.658.596.118	470.432.118.347	548.977.107.934	595.578.424.770
Growth BTL		20,11	16,70	8,49

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, 2013 (Data Olahan)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD KotaJambi pada tahun anggaran 2009 s/d 2012 menunjukkan pertumbuhan positif yang berfluktuatif. Terutama pertumbuhan pendapatan, yang pada tahun 2010 sebesar 13,74% dan pada tahun 2012 sebesar 17,11%.

PAD juga mengalami pertumbuhan yang pada tahun 2010 sebesar 27,25% dan pada tahun 2012 sebesar 14,23%. pertumbuhan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain pendapatan, belanja pemerintah Kota Jambi yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak langsung juga mengalami pertumbuhan. Namun pada tahun 2010 Belanja langsung mengalami penurunan sebesar 8,06 % dari tahun sebelumnya. Setelah itu pada tahun 2011 dan 2012 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 52,70% dan 21,49%. Di tahun 2011 pertumbuhan belanja langsung meningkat sangat besar ini disebabkan karena pada tahun 2011 semua pos-pos belanja langsung seperti belanja barang dan jasa, dan belanja modal mengalami kenaikan cukup tinggi akibatnya pertumbuhan belanja tidak langsung pada tahun 2011 turun, yang mana pada tahun 2010

pertumbuhannya sebesar 20,11% pada tahun 2011 sebesar 16,70%. Dari analisis rasio pertumbuhan diatas kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi baik karena pemerintah Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Walaupun peningkatan pertumbuhan PAD tahun 2009 s/d 2012 lebih rendah, setidaknya pemerintah mampu meningkatkan Penerimaan PAD dan PAD tetap mengalami pertumbuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 109, 02%. Surplus anggaran dari tahun ke tahun juga semakin meningkat bahkan pada tahun 2012 Kota Jambi mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 54.087.128.410. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Kota Jambi seperti kemandirian keuangan Kota Jambi yang masih rendah dan aktifitas pemerintah Kota Jambi dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja tidak langsung seperti belanja pegawai. Kinerja pengelolaan keuangan Kota Jambi baik karena pemerintah Kota Jambi mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kota Jambi serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jambi harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kota Jambi dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kota Jambi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayu Media, Malang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra dan Supriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul.2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta
Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi: Biro Keuangan Provinsi Jambi
- Mardiasmo. 2004. *Bunga Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.: Andi. Yogyakarta
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*.: Andi. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*.: Alfabeta. Bandung
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode*.: Aksara Satu. Surabaya
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*..UMM Press. Malang
- Yuwono, Soni. Indrajaya dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran sektor publik*.: Bayu Media Publishing. Malang
- Peraturan pemerintah nomor 25 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi : Dispenda Provinsi.
- Realisasi APBD Tahun 2009-2012Jambi Dalam Angka :BPS.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah